MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2026

Pukul : 09:00 – 11:00

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Rapat Bulanan Periode April 2026

Peserta : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang beserta segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

A. Penyampaian dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Kita semua harus memperhatikan dan menaati Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, SE MenPAN RB No. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara yaitu "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, serta mempedomani 8 Nilai Utama Mahkamah Agung dan motto PTUN Kupang yaitu "ITA ESA";
2. Tetap menjaga konsistensi kerja dan menjaga kedisplinan, setiap hari jumad melakukan wfh dan setiap aparatur dibagikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai surat Sekma turunan dari Kempan RB;
3. Terkait dengan kebersihan kantor, rumput-rumput dipotong dan bunga-bunga di perhatikan/disiram agar tidak layu;
4. Ucapan terimakasih atas prestasi perlombaan LKTI yang diraih oleh pak charles dan pak fadil;
5. Terkait dengan zona integritas, PTUN Kupang diusulkan diwilayah PTTUN Mataram untuk mendapatkan predikat WBK & WBBM, yang menjadi catatan agar diselesaikan secara sempurna dan tetap menjaga kedisplinan dan integritas
6. Terkait dana Bapor karena belum pernah digunakan selama ini, sehingga disampaikan mohon kesepakatannya apakah dipakai untuk pengadaan baju dinas, baju olahraga atau dibelikan seragam taktikal. Dipersiapkan model, warna dan menyesuaikan dengan budget yang tersedia.

7. Setiap triwulan akan memberikan reward kepada pegawai menurut penilaian atasan langsung perbagian, di rapatkan nama pegawai sebagai pegawai dengan kinerja terbaik dari bagian kesekretariatan a.n pak dunan ginting, dari bagian kepaniteraan a.n pak ade brian. Ini menjadi semangat bagi yang lainnya untuk berkontribusi, berdedikasi berkaitan dengan kinerja, juga harus bergulir setiap triwulan agar yang lain mendapatkan reward sehingga dapat lelbih semangat dalam bekerja.

B. Penyampaian dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Berkaitan dengan laporan hawasbid kepaniteraan perkara:
   a. Terkait dengan temuan hawasbid dibulan maret, temuan-temuan tidak terlalu banyak, keterlambatan upaya hukum banding yang seharusya 30 hari, keterlambatannya 11-16 hari. Alasannya karna libur, cuti bersama dan libur daerah. Khusus perkara No 20 untuk diperhatikan karena ada penyesuaian terkait dengan jumlah pihak. Perkara 21 terkait keterlambatan, masalahnya mengenai redaksi putusan, untuk segara di kirim dan dikasih keterangan/melampirkan surat keterangan dan konfrmasi ke PTTUN Mataram mengenai SOP
   b. Bagian keuangan perkara, terkait SK kasir agar diperbaharui dari ibu jean dan di ganti dengan pak hafish
   c. Untuk umum dan keuangan, belum terdistribusi dan tercatat, dan terdapat 2 lemari toga hakim agar disekat-sekat dan 1 buah lemari masih diletakan dilorong, terkait dengan BMN, progressnya dilaporkan.
   d. Bagaian kepegawaian temuan-temuan nihil
   e. Bagian Ptip,temuan-temuan sudah ditindaklanjuti
   f. Sudah masuk dalam kegiatan monev triwulan 1, banyak kegiatan-kegiatan monev yang harus dilakukan dan ada 5 monev yang sudah dilakukan mulai dari monev Posbakum, monev SOP, monev PPID, monev inovasi dan reward. Dan yang menjadi persoalan selama ini adalah untuk kelengkapan dokumen yang selalu menumpuk karena tidak langsung dikerjakan, jadi untuk notulen-

notulen agar segera diselesaikan dan yang baru disampaikan notulen PPID, notulen Posbakum dan inovasi, yang terkait dengan monev-monev dijadikan kegiatan rutin yang harus dilakukan tiap triwulan dan bulanan demi memberikan pelayanan yang lebih baik. Inovasi-inovasi perlu dipantau dan dievaluasi dari tim inovasi. Kemudian mengenai zona integritas, timeline tanggal 24 akhir pemeriksaan di dirjen, LKE yang terakhir jika ada tambahan catatan agar diperbaiki dan ditambahkan.

g. Monev MISS, direkap dari bulan januari, progres rekapannya januari 2026 jumlah ketidakpatutannya ada 5 keterlambatan, bulan februari ada 62 keterlambatan karena ada dokumen perbaikan yang terbawa dari tahun lalu, terdiri dari perkara no 33/G/2025/PTUN.KPG, perkara no 26/G/2025/PTUN.KPG pada tanggal 6 februari 2025, Perkara no 32/G/2025/PTUN.KPG ada 4 hari untuk jadwal sidang, data saksi dan berita acara persidangan, perkara 43/G/2025/PTUN.KPG ditanggal 3 dan februari 2026, gugatan perbaikan ditanggal 21 desember 2025 sampai 6 februari 2026, perkara 38/G/2025/PTUN.KPG 1 kali keterlambatan, perkara no 44/G/2025/PTUN.KPG dari tanggal 15 januari 2026 sampai 24 februari 2026, perkara 35/G/2025/PTUN.KPG keterlambatan 1 kali, perkara 39/G/2025/PTUN.KPG 1 kali keterlambatan, dibulan maret ada 4 keterlambatan, perkara 38/G/2025/PTUN.KPG data saksi, perkara no 3/G/2026/PTUN.KPG, 41/G/2025/PTUN.KPG, perkara no 4/G/2026/PTUN.KPG. Dan bulan april 2026 ada 4 keterlambatan, perkara no 39/G/2025/PTUN.KPG, 41/G/2025/PTUN.KPG, perkara no 8/G/2026/PTUN.KPG dan perkara no 9/G/2026/PTUN.KPG. Ini menjadi tanggungjawab majelis agar dipantau pengisian SIPP sehingga tidak ada keterlambatan.

2. Berkaitan dengan laporan hawasbid kepaniteraan hukum:
   a. Untuk catatan surat kuasa khusus kolom tanggal tidak ditulis, yang belum tercatat ada 3 tanggal surat kuasa dari 20 surat

kuasa yang belum tercatat;

C. Laporan Hakim Pengawas Bidang

1. Kepaniteraan Hukum:
   - Semua temuan sudah ditindaklanjuti.
2. Kepaniteraan Perkara
   - Nihil.
3. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
   - Bahwa telah dilakukan pengawasan di bulan April 2026 terhadap bidang Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terdapat Bezeting belum diperbaharui ditahun 2026
   - Bahwa telah dilakukan pengawasan di bulan April 2026 terhadap bidang Subbag Kepegawaian terdapat lemari baru yang diperuntukan di ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
   - Uraian tugas belum dibuat di setiap meja Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
4. Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan
   - Berdasarkan temuan oleh Hakim Pengawas Bidang, ditemukan adanya broken link dan juga tidak bisa masuk di beberapa tautan di website seperti : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode Triwulan I Tahun 2026, Laporan Survei SKM dan SPAK, Maklumat Pelayanan Informasi, Maklumat Pelayanan, Motto PTUN Kupang, Whatsapp Center PTUN Kupang, 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, Jam Kerja dan PTUN Kupang : One Information Center
   - Belum updatenya foto kegiatan di website (foto terakhir adalah kegiatan monev dari PTTUN Mataram pada bulan september 2024), dan pada saat di klik fotonya, halaman yang muncul kosong, lebih baik menu foto ditautkan dengan instagram PTUN Kupang
   - Belum updatenya video di dalam website serta minimnya video

literasi terkait pelayanan pengadilan, lebih baik menu video ditautkan dengan youtube PTUN Kupang

5. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   - Berdasarkan temuan pada bagian umum yaitu belum terdistribusi dan tercatatnya BMN berupa 3 buah lemari toga hakim, 2 buah lemari telah diletakan diruangan hakim, dan 1 buah lemari masih diletakan dilorong lantai 1

D. Laporan dari bagian kepaniteraan yang diwakili oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:
   1. Untuk kepaniteraan tetapkan jalankan pekerjaan berpedoman pada SOP, terutama berpatokan pada kode etik panitera dan jurusita.
   2. Kedisplinan masuk kantor dan jam pulang kantor, terkait WFH agar tetap absen pagi dan sore.

E. Laporan dari bagian kesekretariatan yang diwakili oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:
   1. Laporan realisasi DIPA 01, bahwa pada bulan maret 2026 registrasi di DIPA 01 sebesar 66,28% , pada bulan april sesuai data SAKIP mengalami penurunan menjadi 49,08%, hal ini di karenakan yang pertama ada penambahan anggaran dana, yang diawalnya itu DIPA kita sebesar Rp.7.000.000.000,- menjadi Rp.17.000.000,- inilah yang menjadi salah satu penurunan anggaran. Sepertinya dari pusat sudah direvisi penambahan tunjangan jabatan dan lain-lain, juga ada tambahan ABT penambahan sewa rumah dinas sekitar Rp.52.000.000, untuk ABT DIPA 01 penambahan sewa rumah dinas sebelumnya sekitar Rp.88.000.000, jika dihitung dengan penambahan menjadi Rp.140.000.000, dengan adanya penambahan hakim-hakim mulai bulan mei 2026 hakim-hakim sudah menerima kekurangan gaji, SK PP ibu hakim dita sudah bisa pindah dari ambon ke kupang sehingga sudah bisa buatkan SK penempatan rumah dinas. Jadi nanti sewa rumah dinas itu ada sekitar 5 orang.
   2. Tentang prodeo, berdasarkan rapat monev posbakum disampaikan dari dana posbakum sekitar Rp.400.000, namun

setelah dilakukan pengecekan dan telah direvisi untuk anggaran prodeo yang kita dapatkan itu Rp.600.072,

3. Pengamanan sidang sudah dilakukan dan realisasinya untuk 2 perkara pengamanan sidang sebesar Rp.900.000, dan masih tersisa Rp. 1.100.000, dan mohon bantuan kepada panitera-panitera pengganti jika dibutuhkan pengamanan sidang untuk bisa direalisasikan anggaran yang ada, jadi untuk perkara prodeo ini anggaran Rp.600.072,000. Dengan rincian, surat panggilan Rp.100.000, untuk ATK Rp.572.000.000,
4. Untuk sidang keliling anggaran tersedia 97.600.000, mohon bantuannya karena sudah masuk bulan april triwulan kedua sekiranya bisa ada minimal 1 perkara lagi untuk merealisasikan karena di DIPA 05 realisasinya sampai sekarang masih 5,39%
5. Soal ATK posbakum sudah dibicarakan dengan pihak LBH Caritas untuk ATK dapat dikondisikan dengan realisasinya dengan bagian keuangan.
6. Baperjaket yang sudah dilakukan untuk usalan-usulan pak marvin untuk menduduki salah satu jabatan kasub dan dimana posisi awal yang kosong kasub kepegawaian dan menyusul 5 bulan berikutnya juga ada jabatan kasub yang kosong, jadi dalam isi surat usulan yang sudah ditanda tangani oleh Bapak Ketua tersebut bahwa sebutkan untuk usulan jabatan kasubag tidak disebutkan secara terperinci karena nanti juga kasub-kasub diminta untuk rolling, mohon doa restu dari semua sekiranya usulan dari pak marvin ini dapat berjalan lancar, dari PTTUN Mataram bisa diteruskan dan di Biro kepegawaian pun bisa segera turun TPM-nya.
7. Dan sampaikan juga untuk usulan Pak Yusak Kese sebagai panitera pengganti sudah dilakukan baperjakat
8. Mengenai temuan dibagian umum dan keuangan mengapa meuble belum masuk di bmn karena memang belum bisa tercatat karena belum dibayarkan, itu harus proses atau menyelesaikan terlebih dahulu proses pengadaan meuble-nya baru bisa didata

masuk BMN. Dan disampaikan untuk pengadaan meuble sebenarnya sudah proses di E-katalog namun ada beberapa kendala terkait penyedia itu mereka ada kesalahan dalam penginputan nilai pajak jadi nilainya waktu itu cuma Rp. 105.000.000 sedangkan pengadaan kita Rp.116.000.000 jadi masih selisih sekitar Rp.11.000.000 dan mereka harus membatalkan surat pesanan makanya untuk pembayaran sampai sekarang realisasi kamipun belum bisa kami realisasikan, perubahannya dibulan mei sesuai dengan laporan kami kemarin dibulan mei harus sudah terselesaikan

9. Untuk sekat lemari toga akan sedang diproses karena dibagian perkarapun untuk lemari arsip ternyata ada revisi dari 3 sekat menjadi 2 sekat, karena untuk odner tidak bisa masuk, spacenya sempit namun sudah diperbaiki
10. Penggunaan Listrik tetap di Rp.9.000.000, agar tetap bekerjasama dalam penggunaan elktronik
11. Terkait pengadaan baju dinas, belum disampaikan pada rapat bulanan, karena pakian dinas ini salah satu yang masuk direktif presiden, jadi anggarannya itu per orang sekitar Rp.500.089.625 per stel, anggaran normal untuk pakian dinas Rp.700.- dikarenakan sesuai janji dari Biro keuangan kena direktif presiden dan masih tahan dananya sampai triwulan III jadi pada triwulan IV jika sudah semua kekurangan-kekurangan untuk penambahan anggaran-anggaran di MA RI ini sudah selesai baru bisa dibukalah itu direktif presiden, satu orang terimanya 2 stel jatahnya untuk anggaran ditahun ini. Di dipa yang dianggarkan sebenyak 41 orang sedangkan kita sekarang ada 42 orang mohon kebijakan dan solusi dari pak ketua untuk realisasikan anggaran, karena hitungan untuk hakim sebanyak 11 orang, CPNS 4 orang, PPPK ada 7 orang dan untuk pegawai 19 orang.

F. Laporan Keuangan/Kas:

1. Untuk dana Taktis, sebesar **Rp. 2.525.000,-**
2. Untuk dana PTWP, saldo per tanggal 30 April 2026 sebesar **Rp.**

2.145.000,- krna ada acara ptpwp pengeluaran Rp.800.000.000

3. Untuk dana Bapor saldo per tanggal 30 April 2026 sebesar **Rp. 21.818.000**,-
4. Untuk dana DYK, saldo per tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp. 3.259.500**, -, lalu ada penambahan dari bendahara sebesar **Rp 110.000,-** sehingga saldo akhir per bulan 30 april 2026 **Rp.3.369.500**

G. Sesi Tanya – Jawab:

- Nihil

Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis,	Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
NOVATSIANA AMINDA DOKO S.P.	I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.
NIP. 199711222025212026	NIP. 19760103200105 1 001